

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (1995:104):

Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti ; ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan. Untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut, dituntut adanya suatu penataan dalam sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas transportasi yang terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang bersangkutan

Demikian pula halnya dengan Kota Bandar Lampung, sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, secara otomatis Bandar Lampung menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga sistem transportasi kota, khususnya sistem transportasi dan lalu lintas darat harus ditata

dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai ideal sebagaimana telah disebutkan di atas.

Transportasi merupakan permasalahan yang mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat modern. Selain mempunyai dampak secara ekonomis, transportasi berdampak secara sosial dan budaya yaitu dengan membentuk gaya hidup dan dampak politik. Isu ini acap kali menduduki tempat terkemuka dalam pembahasan agenda politik. Permasalahan yang terjadi dalam transportasi kota adalah kemacetan lalu lintas. Di Bandar Lampung, kemacetan lalu lintas merupakan fenomena dan permasalahan strategis yang sehari-hari dapat dijumpai. Selanjutnya akan digambarkan pada dua pembahasan yaitu; peta kemacetan lalu lintas dan faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Karakteristik lalu lintas darat Kota Bandar Lampung pada dasarnya hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Apabila dilihat dari jaringan jalannya, terdapat bagian yang membentuk jaringan jalan dan area khusus pada daerah pusat kegiatan atau *Central Business District* (CBD). Terdapat pula jalan-jalan alternatif yang merupakan jalan lain untuk menuju tempat tujuan (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012)

Selain itu Kota Bandar Lampung merupakan kota perlintasan bagi kendaraan pribadi maupun umum untuk angkutan orang dan angkutan barang yang akan menuju ke Pulau Jawa atau masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Jalan yang dilintasi yaitu Jalan Soekarno Hatta yang merupakan jalan lintas trans Sumatera. Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional dan saling berhubungan, sehingga pembahasan

mengenai masalah ini, tidak dapat dilakukan secara terpisah dan parsial tetapi dilakukan secara utuh dan menyeluruh (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012).

Beberapa faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Bandar Lampung adalah terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota. Berbagai aktivitas masyarakat kota seperti; ekonomi (tempat perdagangan, perusahaan swasta), politik dan pemerintahan (perkantoran pemerintah), serta hiburan dan rekreasi secara dominan terkonsentrasinya di Tanjung Karang dan Teluk Betung. Sehingga pergerakan (mobilitas) orang dan barang yang menuju, melalui dan meninggalkan pusat-pusat kegiatan tersebut menjadi sangat tinggi. Hal inilah yang secara konsisten menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Selain itu besarnya jumlah angkutan umum seperti; mikrolet (angkot), bus kota dan taksi serta kendaraan pribadi (beroda dua atau empat) menjadi penyebab kemacetan lalu lintas kota Bandar Lampung. Belum lagi besarnya kendaraan pribadi beroda dua dan kendaraan roda empat (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pergerakan orang maupun barang maka diperlukan suatu pola transportasi yang diatur dalam suatu sistim jaringan transportasi. Sarana infrastruktur lalu lintas darat Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan sistem jaringan transportasi meliputi jalan, jembatan penyeberangan, perparkiran, dan terminal. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki

tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengaturan dan penertiban lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas ini oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dituangkan ke dalam suatu program kerja dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, selain harus secara terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat secara luas.

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kurangnya kenyamanan masyarakat pengguna angkutan kota (angkot) di Kota Bandar Lampung, di antaranya pelayanan awak angkot yang tidak sopan, praktik pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, usia angkot yang sudah tidak layak beroperasi, sopir angkot yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dikenal dengan sopir tembak, perilaku sopir angkot yang tidak mengindahkan keselamatan penumpang . Berbagai permasalahan angkot tersebut tentunya memerlukan solusi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012)

Solusi atas berbagai permasalahan angkot di Kota Bandar Lampung diarahkan pada pencapaian sistem transportasi darat yang memenuhi nilai-nilai ideal ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu

diperlukan penyusunan rencana-rencana strategis oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan.

Upaya pengaturan dan penertiban lalu lintas di Kota Bandar Lampung tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT), sebagai sarana transportasi massal bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kebijakan pemberlakuan BRT dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan maka dikembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem transportasi massal di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan bus rapid transit (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki.

Kebijakan pemberlakuan BRT tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum yang mampu membawa penumpang dalam jumlah besar dibandingkan dengan angkutan kota. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penggantian sarana angkutan umum dari jenis angkutan kota (angkot) menjadi angkutan massal dengan mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan melayani 7 (tujuh) trayek utama di Kota Bandar Lampung yaitu:

- 1) Rajabasa – Sukaraja
- 2) Rajabasa – Panjang
- 3) Rajabasa – Pasar Cimeng
- 4) Kemiling – Simpang Jl. Ir. Sutami
- 5) Kemiling – Sukaraja
- 6) Perum. Korpri – Sukaraja
- 7) Panjang - Lempasing

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012)

Pemberlakuan BRT tersebut tentunya mendapatkan tanggapan atau persepsi dari masyarakat selaku pengguna jasa transportasi BRT. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Tentang Pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Tentang Pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT)?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Tentang Pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT)

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang transportasi masal.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan pada khususnya dalam rangka memberlakukan BRT sebagai sarana transportasi di Kota Bandar Lampung dan dapat bermanfaat bagi peneliti lain di masa yang akan datang yang berminat melakukan penelitian mengenai persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.